KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menhub berhalangan, DPR batal rapat kecelakaan KA
Tanggal : Jumat, 15 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Menhub Berhalangan

DPR Batal Rapat Kecelakaan KA

FOTO: IG @RIBADI



Lasarus

KOMISI V DPR batal menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi Senin (27/4/2026). Rapat rencananya digelar pada Rabu (13/5/2026), namun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berhalangan hadir.

Saat itu, sejumlah pejabat seperti Wamenhub Suntana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Basarnas Mohamad Syafii, Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin, perwakilan Mabes Polri, dan jajaran terkait lain telah hadir di Ruang Rapat Komisi V DPR. Namun, karena Menhub tidak bisa hadir, rapat tidak dilanjutkan.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan, Menhub telah mengirimkan dua surat terkait alasan ketidakhadirannya ke Komisi V DPR. Pertama, surat berisi alasan kesehatan. Kedua, karena proses investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas kasus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur belum selesai.

Lasarus melanjutkan, sebanyak enam anggota Komisi V DPR ingin rapat ditunda hingga Menhub bisa hadir. Sedangkan dua anggota lainnya memilih untuk tetap melanjutkan rapat. Alasannya, Kemenhub sudah mewakilkan Wamenhub Suntana.

"Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, kami memutuskan untuk menjadwalkan ulang Raker ini, sampai Menhub bisa hadir," kata Lasarus, dalam rapat tersebut, Rabu (13/5/2026).

Raker ini akan membahas terkait kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, temperan truk dengan KA Commuter Line Dhoho di Jawa Timur, dan kecelakaan bus PO ALS dengan truk tangki di Sumatera Selatan (Sumsel).

Lasarus melanjutkan, alasan lain Raker ditunda karena permasalahan tersebut menyangkut perhatian banyak masyarakat, sehingga perlu dibahas secara hati-hati agar tidak menimbulkan polemik. "Jadi harus mendapat penjelasan dari yang bertanggung jawab langsung itu adalah Menhub," ujar politisi PDIP ini.

Anggota Komisi V Mori Hanafi mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Menhub dalam rapat itu. Apalagi, alasan ketidakhadiran Menhub yang menyebut investigasi KNKT atas kasus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi belum selesai.

"Saya terus terang kecewa ini Menhub. Apalagi alasan yang disampaikan adalah karena masih dalam proses penyelidikan, buat saya nggak masuk akal," kritik Mori.

Senada, anggota Komisi V DPR Syafiuddin Asmoro menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Menhub. Padahal secara tata tertib, rapat ini harus dihadiri menteri secara langsung. Tentu, pihaknya tetap menghargai kehadiran wamenhub dalam rapat ini. "Kita harus disiplin dan harus tegas," tegas Syafiuddin. ■ TIF